

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang Akuntabilitas Keuangan di Desa Temuwuh dan Terong yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa sistem akuntabilitas di Pemerintahan Desa Terong telah akuntabel didalam Pengelolaan keuangan Desa karena Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan Desa Terong berpedoman pada Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan sehingga alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa terong telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat.

Namun di Desa Temuwuh sendiri belum akuntabel. Bahwa dalam perumusan keuangan dan pembangunan Desa, ditenggarai hanya oleh Pemerintah Desa itu sendiri karena hasil dari Musrembang dan Musdes yang telah disepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipatifnya

pemerintah desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh tidak ada memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka didapatkan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa Teumuwh

Pemerintah Desa Temuwuh selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa sebaiknya lebih melakukan koordinasi bersama BPD dan unsur masyarakat dalam perumusan keuangan desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh diharapkan aktif dalam menjaring aspirasi dan gagasan dalam perencanaan pembangunan dari bawah yaitu dengan membentuk perkumpulan rutin dimasing-masing dusun yang ada di desa temuwuh bersama tokoh masyarakat dan BPD dusun. dalam pelaporan Pemerintah Desa diharapkan berkoordinasi dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat untuk bersama mengevaluasi hasil pelaporan keuangan Desa dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar pmerintah desa lebih transparan.

2. Rekomendasi Kepada BPD dan Masyarakat Temuwuh

BPD dan masyarakat terlebih Tokoh Masyarakat adalah unsur penting dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa karena bagaimanapun yang akan merasakan dampak dari realisasi keuangan tersebut adalah masyarakat maka sebagai unsur dalam akuntabilitas keuangan desa khususnya di Desa

Temuwuh yang seharusnya dilibatkan dalam perumusan dan Pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa namun dalam kenyataannya seperti analisa dari wawancara bahwa BPD dan Tokoh Masyarakat tersebut tidak dilibatkan dalam perumusan keuangan desa. Maka Diharapkan BPD dan masyarakat terlebih Tokoh masyarakat bisa proaktif untuk mengawasi dan mengingatkan Pemerintah Desa Ketika yang dikerjakan tidak sesuai pada alurnya.

3. Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa Terong

Pemerintah Desa terong sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuanga dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Dlingo hal ini diharapkan biasa menambah pengalaman dan wawasan khususnya staf atau Pamong di Desa Temuwuh itu sendiri dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan keuangan serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan dengan rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

4. Rekomendasi Kepada BPD dan Masyarakat Desa Terong

BPD dan Masyarakat terong sudah cukup baik dalam berpartisipasi dan mendukung pemerintah desanya dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Namun dari semua yang sudah dicapai oleh pemerintah desa

harus dipertahankan. Maka diharapkan BPD beserta masyarakat juga harus selalu mengingatkan dan mengawasi pemerintah agar tetap pada jalurnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, beserta secara proaktif meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah desa melalui BPD, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu dengan melakukan perkukmpulan rutin untuk pemerintah desa bias mensosialisasi kepada masyarakat terkait pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.